

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu bagian dari manajemen administrasi perkantoran yang patut diberi perhatian lebih, agar terwujudnya tujuan dari manajemen administrasi perkantoran itu sendiri yaitu salah satunya keefektifan dan keefisienan kerja. Sebagai contoh bagaimana prosedur dalam memberikan suatu layanan kepada masyarakat. Pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi akan selalu berhubungan dengan masyarakat dalam berbagai pengurusan hak atas tanah, salah satunya Hak Pakai atas tanah instansi pemerintahan.

Dalam pengurusan Hak Pakai atas tanah instansi pemerintah sudah ada standar operasional prosedur pengurusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan standar operasional prosedur tersebut telah dijelaskan berapa lama waktu pengurusan dan bagaimana tahapan atau langkah-langkah dalam pengurusan.

Berbeda dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi membuat kebijakan tersendiri dalam proses pengurusan Hak Pakai atas tanah instansi pemerintah Kota Bukittinggi, dimana pemohon langsung diarahkan ke Sub Seksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah, bukan melalui loket pelayanan. Kebijakan yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan ini dibuat dikarenakan tidak adanya petugas yang

ditunjuk untuk melayani bagian pengurusan tanah pemerintah itu sendiri. Jadi maka dari itu, untuk penerapan standar operasional prosedur yang telah ada pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi masih bisa dikatakan kurang atau belum diterapkan sepenuhnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi

Diharapkan kepada pihak Kantor Pertanahan agar menunjuk atau merekrut pegawai sebagai petugas loket pelayanan untuk mengurus proses administrasi yang berhubungan dengan pengurusan tanah pemerintah, agar dapat terwujudnya penerapan Standar Operasional Prosedur demi keefektifan dan keefesienan kerja.

2. Bagi Pemohon Pengurusan Hak Pakai Atas Tanah

Diharapkan kepada pemohon dalam melakukan permohonan untuk pengurusan Hak Pakai hendaknya mengajukan berkas persyaratan secara lengkap agar tidak terjadinya hambatan dalam proses pendaftaran pengurusan Hak Pakai.